**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

**Awalludin1, Bahrul Ulum2, Nurul Hidayati Murtafiah3**

1Institut agama islam An Nur Lampung, Indonesia

1Institut agama islam An Nur Lampung, Indonesia

1Institut agama islam An Nur Lampung, Indonesia

Email: abufatih6@gmail.com1, bahrululum71@admin.smp.belajar.id2

|  |
| --- |
|  |
| Received: 25-11-2022 | Accepted: 27-11-2022 | Published: 30-11- 2022 |

***Abstract****: Financing for training fundamentally centers around endeavors to disperse instructive advantages and weights that should be borne by the local area. Cost is just how much cash spent or benefits gave to understudies. Training financing connects with the dissemination of the taxation rate in different sorts of expense gatherings as well as the strategy for moving charges to schools. The main thing in training supporting is how much cash that should be spent, where the wellspring of the cash is acquired, and to whom the cash should be spent. By and large, Islamic instructive organizations experience a few deterrents connected with the administration of instructive supporting. Truth be told, in Islam, the conventional schooling system held by the state is completely borne by the state (Baitul Mal). Islamic history basically has shown that. So Islamic instructive organizations ought to get back to the khittah of overseeing instructive funding as exemplified by the caliphs in the Islamic caliphate.*

***Keyword****: Management, financing, education financing, Islamic education.*

**Abstrak**: Pembiayaan untuk pelatihan pada dasarnya berpusat pada upaya menyebarkan manfaat dan bobot instruktif yang harus ditanggung oleh daerah setempat. Biaya adalah berapa banyak uang yang dihabiskan atau manfaat yang diberikan kepada siswa. Pembiayaan pelatihan terkait dengan sosialisasi tarif pajak di berbagai jenis pengumpulan biaya serta strategi untuk memindahkan biaya ke sekolah. Hal utama dalam pendampingan pelatihan adalah berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, dari mana sumber uang itu diperoleh, dan kepada siapa uang itu harus dibelanjakan. Secara umum, organisasi pendidikan Islam mengalami beberapa hambatan terkait dengan administrasi dukungan pendidikan. Sejujurnya, dalam Islam, sistem persekolahan konvensional yang diselenggarakan oleh negara sepenuhnya ditanggung oleh negara (Baitul Mal). Sejarah Islam pada dasarnya telah menunjukkan hal itu. Maka organisasi pendidikan Islam harus kembali pada khittah mengawasi pendanaan pendidikan seperti yang dicontohkan oleh para khalifah di khilafah Islam.

**Kata Kunci**: *Manajemen, pembiayaan, pembiayaan pendidikan, pendidikan Islam.*

**PENDAHULUAN**

Contoh persoalan yang masih sering melanda lembaga pendidikan, khususnya yayasan pendidikan Islam di negeri ini, adalah persoalan pemerataan dana pendidikan dan pelatihan yang disebut-sebut belum ditingkatkan pengakuannya. Ini secara praktis mempengaruhi bagian pelatihan yang tersisa. Padahal biaya pendidikan merupakan bagian dari informasi instrumental yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan madrasah. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan dukungan pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Hampir tidak ada usaha pendidikan yang dapat mengabaikan biaya pekerjaan, sehingga dapat dikatakan tanpa uang interaksi pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik.(Huda, Achmad, Banjarmasin, Jalan, & Km, 2020)

Pada tataran regulasi, penjangkauan program, penataan kantor, pelaksanaan, pengelolaan, penilaian, dan instrumen bantuan pendidikan lainnya, hampir semuanya membutuhkan pendampingan, baik secara langsung maupun sirkular. Selain itu, dalam mengejar keberhasilan berbagai rencana instruktif, baik secara langsung maupun implikasinya, baik oleh otoritas publik maupun domain rahasia, pendanaan adalah satu - meskipun bukan satu-satunya - faktor yang mempengaruhi hasil. Ini karena biaya mendorong kecepatan di mana berbagai proyek mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Waliyah, Dini, & Syarif, 2021)

Mudahnya, pelaksanaan sekolah membutuhkan uang. Hal ini karena penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di sekolah dan madrasah secara keseluruhan membutuhkan dinas dan yayasan untuk mengawasi proses, administrasi, pelaksanaan program, dan bantuan pemerintah dari para pendidik dan perwakilan yang ada. Semua ini membutuhkan rencana pengeluaran. Persoalannya, bagaimana masalah dana bisa dikawal dengan baik oleh yayasan-yayasan pendidikan Islam yang di Indonesia sangat beragam. Selain itu, masalah yang sering muncul di permukaan adalah lembaga pendidikan tidak mampu menangani rencana keuangan saat ini seperti yang diharapkan sehingga menyebabkan lubang dalam implementasinya. Cadangan yang terbatas mengharuskan administrator yayasan pendidikan untuk inventif, peka untuk membuka pintu luar biasa, membuat koneksi, dan mengawasi aset yang ada dengan benar.(Haekal et al., 2022)

Subsidi pendidikan pada hakekatnya berpusat pada upaya menyampaikan manfaat dan bobot pelajaran yang harus ditanggung oleh daerah setempat. Biaya pada dasarnya adalah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membantu interaksi pendidikan atau layanan yang diberikan kepada siswa. Pendanaan untuk pelatihan terkait dengan sirkulasi tarif pajak dalam berbagai biaya dan teknik transfer tugas ke sekolah. Hal utama dalam mendukung pelatihan adalah berapa banyak uang yang dikeluarkan, dari mana mendapatkan uang dan kepada siapa membelanjakannya.(Kurniady, Setiawati, & Nurlatifah, 2018)

Sedangkan dana pengajaran adalah berapa banyak uang yang dihasilkan dan dikeluarkan untuk tujuan lain di balik pelaksanaan pelatihan yang meliputi kompensasi instruktur, peningkatan keterampilan guru yang luar biasa, pengadaan ruang belajar kantor, perbaikan ruangan, perolehan peralatan, bacaan kursus, bahan tulis kantor, dukungan gerakan ekstra kurikuler, pelatihan administrasi instruktif, dan manajemen instruktif.

Dalam ungkapan organisasi keuangan, khususnya organisasi keuangan di bidang persekolahan, dibedakan antara pengeluaran dan biaya. Biaya adalah ukuran penilaian aset yang harus dikembalikan untuk kegiatan tertentu, misalnya kegiatan sekolah, kegiatan kemahasiswaan, dll. Sedangkan pengeluaran (penggunaan) adalah berapa dana awal yang diberikan untuk mendanai unit kegiatan. latihan tertentu, misalnya latihan praktikum mahasiswa. Selanjutnya, seringkali ada perbedaan antara pengeluaran yang direncanakan dan pengeluaran yang sebenarnya.(Efrina, 2019)

Pengeluaran dapat diuraikan sebagai biaya yang dalam istilah keuangan biaya / biaya dapat berupa uang tunai atau struktur terkait uang lainnya. Biaya pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa siklus instruktif tidak dapat berjalan tanpa bantuan uang. Biaya pelatihan merupakan bagian penting dari kontribusi penting untuk pelaksanaan instruksi, khususnya di sekolah. Ditinjau dari sumbernya, biaya pelatihan dapat dibedakan menjadi empat macam: pertama, biaya pendidikan yang disebabkan oleh otoritas publik. Kedua, biaya pendidikan disebabkan oleh daerah setempat atau wali/penjaga siswa. Ketiga, biaya pendidikan ditanggung oleh masyarakat pada umumnya, bukan oleh mahasiswa, misalnya dukungan dari yayasan dan organisasi keuangan. Selanjutnya, keempat, dari organisasi instruktif itu sendiri.(Rahmadoni, 2018)

Setiap sumber tersebut merupakan pos metodologi dalam aliran pembiayaan pelatihan untuk membantu program persekolahan yang dibukukan, baik oleh lembaga pendidikan itu sendiri sebagai wadah penguatan dan perbaikan, maupun otoritas publik sebagai pihak yang memiliki strategi dalam perencanaan. yang secara kelembagaan memiliki kewajiban pokok dan dorongan utama terhadap kelangsungan dan keefektifan latihan-latihan instruktif. Dengan cara ini, faktor biaya sangat persuasif pada pelaksanaan pelatihan. Dalam investasi waktu dan energi yang signifikan untuk mencapai tujuan instruktif, baik tujuan kuantitatif maupun subyektif, biaya sekolah memainkan peran yang sangat penting. Hampir tidak ada usaha pendidikan yang dapat mengabaikan tugas biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa uang, siklus pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan dengan baik. Biaya dalam pengertian ini memiliki derajat yang luas, lebih tepatnya berbagai kegunaan yang berhubungan dengan pengaturan pelatihan, baik sebagai uang tunai maupun barang dagangan dan pekerjaan (yang dapat dinilai dengan uang tunai).

Mencermati pengertian di atas, maka sangat bisa dipastikan bahwa pada dasarnya biaya penyelenggaraan sekolah itu bermacam-macam ya. Ada punter yang berhubungan dengan administrasi pendukung sebagai pekerjaan untuk mensukseskan pelaksanaan program pelatihan, harus ditanggung oleh kepala sekolah, pemilik pendirian, pemerintah, dan fakultas lain yang terkait dengan perencanaan dan pengawasan biaya pengajaran. Penjelasannya, bagian-bagian tersebut merupakan penghibur di dalamnya. Apakah jalannya tindakan dan para eksekutif bergantung pada bagian-bagian ini.(Abidin, 2017)

Oleh karena itu, apa ide ideal untuk mendukung pelatihan, apa saja bagian dari pendanaan, bagaimana bisa dilaksanakan di lembaga pendidikan?

**METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari artikel di jurnal terbaru dan buku yang berkaitan dengan isi pokok permasalahan dan pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok pembahasan (S Nasution, 2009)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penyelidikan pendanaan pelatihan, ada beberapa istilah penting yang harus diperhatikan, antara lain objek biaya, data administrasi biaya, pendukung, keuangan, rencana pengeluaran, biaya, cost driver. Istilah-istilah ini merupakan lampu hijau dalam penyelidikan aspek keuangan.(Abidin, 2017) Untuk mengetahuinya, pencipta menggambarkannya sebagai berikut:

Setiap lembaga atau asosiasi, selama menyelesaikan programnya, selalu dikaitkan dengan latihan sebagai pemimpin kerangka kelembagaan atau otoritatif yang membutuhkan cadangan. Oleh karena itu, biaya semua latihan saat ini adalah objek biaya. Seperti yang diungkapkan, bahwa objek pengeluaran adalah kegiatan yang luar biasa. Blocher selanjutnya membagi jenis objek biaya menjadi empat: a) item atau kumpulan item yang saling berhubungan, b) administrasi, c) divisi (kantor khusus, kantor SDM), d) Usaha (penelitian, pengembangan pameran atau area lokal petualangan administrasi).

Biaya regulasi adalah biaya untuk kegiatan dewan dengan tujuan agar mereka dapat bertindak sebagai kesiapan, kursus gratis dan instrumen kontrol. Dengan demikian, amalan-amalan yang dimaksud dapat diselesaikan secara sempurna, efektif, dan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Organisasi biaya adalah pemikiran yang sangat luas yang menyatukan semua informasi yang diharapkan untuk menyaring pengeluaran nyata serta informasi non-keuangan yang berhubungan dengan efektivitas, kualitas, dan faktor perakitan utama lainnya untuk afiliasi. Informasi keuangan saja dapat menyebabkan kesalahan mengemudi karena informasi biasanya nol pada saat ini. Untuk mendapatkan konsentrasi kemajuan yang serius, organisasi atau organisasi perlu fokus pada informasi tentang sumber biaya yang memperoleh pengalaman lebih lama dan dapat dilakukan. (Huda et al., 2020)

Setiap organisasi harus mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek bantuan atau mencetak barang-barang tertentu atau berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan lain. Selain itu, dapat dipahami bahwa poros dari pengaturan moneter yang besar memberi dan tidak menggunakan secara tidak menentu. (Sonedi, Jamalie, & Majeri, 2017)Selain itu, diperlukan biaya yang signifikan untuk lembar informasi, termasuk:

1 . Administrasi penting: memilih pilihan kunci yang tepat untuk pemulihan produk, sistem proses, metodologi dan menampilkan saluran dan masalah jangka panjang.

2 . Pengorganisasian dan pengambilan keputusan membantu pengambilan keputusan dalam pengertian umum yang berhubungan dengan memindahkan perangkat keras, mengamati pendapatan, membeli bahan, dan meminta.

3 . Harapkan kontrol atas organisasi dan latihan.

4 . Pengaturan laporan keuangan.

Informasi Pembiayaan apabila dikontekskan pada penyeleng- garaan pendidikan, maka informasi manajemen biaya ini dapat dikaitkan dengan informasi tentang sumber biaya, baik dari pemerintah, orang tua murid, masyarakat, serta potensi lain yang menopang biaya penyelangaraan pendidikan. Di sisi lain juga dapat memberi informasi tentang sistem layanan proses belajar mengajar yang dikaitkan dengan biaya yang layak untuk suatu layanan yang sifatnya lebih baik serta upaya mendukung keputusan dengan program yang harus dilakukan secara baik dan benar sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban.

Dengan pengetahuan tentang informasi manajemen pembiaya- an tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas jasa atau produk serta dapat meningkatkan profitabilitas untuk meng-*upgrade* fasilitas layanan pada saat yang tepat dengan berbagai metode layanan terbaru.

Pada dasarnya, pembiayaan pe ndidikan te rkait de ngan masalah bagaimana mencari dana (sumber dana), bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakannya untuk kebutuhan masa yang akan datang. Sementara biaya pendidikan adalah se l uruh us aha yan g di lak ukan ol e h pe me r int ah dan masyarakat baik berupa uang maupun non moneter. Biaya tersebut memerlukan pengelolaan yang jelas.(Azhari & Kurniady, 2016)

Persoalan keuangan di setiap lembaga pendidikan, tidak hanya mencakup uang pembiayaan yang sah semata, namun juga kredit bank. Definisi secara sederhana tentang keuangan *(finance)* adalah seni nuntuk mendapatkan alat pembayaran. Sementara dalam dunia usaha, keuangan meliputi pemeliharaan kas, yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Alat yang dugunakan dalam keuangan meliputi seluruh metode peminjaman uang dan pertukaran satu jenis hak yang berkenaan dengan yang lainnya. Dalam perusahaan dagang, penggolongan keuangan yang utama adalah: perbankan, pasar uang, pasar investasi yang terdiri dari pasar sekuritas dan penerbitan model baru atau kenaikan dana dari penanaman modal untuk perluasan modal baru, pasar uang luar negeri, dan asuransi.

Anggaran merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu terte ntu. Oleh kare na itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu lembaga.

Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen. Di sisi lain, biaya adalah harga pokok ya ng me rupak an ga mba ra n pe n gor ba nan dala m pe n ge r ti an kuantitatif pada saat barang atau jasa dipertukarkan. Pemicu biaya *(cost driver)* adalah faktor yang memberi dampak pada biaya perubahan. Artinya, jumlah total biaya sangat dipengaruhi oleh *cost driver* sebagai faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dari suatu objek biaya. Identifikasi dan analisis terhadap *cost dirver* merupakan langkah penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi.(Haris, I. A & Maulana, 2021)

Sebagai contoh, biaya bahan bakar (objek biaya) di dalam suatu pabrik yang digunakan untuk pembangkit listrik, yang di- pengaruhi oleh rentan waktu yang dibutuhkan merupakan *cost driver* untuk biaya bahan bakar. *Cost driver* umum lainnya adalah jumlah produk yang dihasilkan, jumlah mesin yang di- *setup*, jumlah perubahan desain yang dilakukan untuk membuat suatu produk serta jumlah promosi, pemasaran, dan distribusi.

Apabila dikontekskan dalam pendidikan, lembaga pendidikan sebagai lembaga non profit yang bergerak di bidang jasa, maka faktor-faktor yang menjadi pemicu biaya di antaranya jumlah jam mengajar guru, media pengajaran, buku teks yang digunakan, fasilitas pendukung yang sifatnya temporer. Program-program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah yang secara akumulatif dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan lulusan serta dapat juga dijadikan sebagai pemicu biaya di dalam pendidikan.

**Problem Pembiayaan Pendidikan Islam di Indonesia**

Pada umumnya, persoalan yang diperhatikan oleh madrasah, dalam situasi ini sekolah yang berbasis ketat, adalah persoalan pendanaan pengajaran. Dilihat dari bagian alasannya, dampak lanjutan dari Tempat Jelajah Pendidikan Ketat dan Ketat tahun 2006 dalam mendukung sekolah di madrasah mengungkapkan bahwa kerepotan yang dihadapi madrasah dalam mengawasi dana pelatihan ternyata bermula dari persoalan menaikkan subsidi sendiri. Pencegah utama adalah karena terbatasnya mata air aset yang dapat diinvestigasi. Lagi pula, telah diperoleh dari biaya pendidikan siswa. Sumber kekayaan ini merupakan sumber kekayaan yang sangat tahan lama, meskipun secara nyata jumlah kekayaan yang dapat dihimpun tidaklah banyak, mengingat sebagian besar madrasah berada di pedesaan/pedesaan dan melayani pendidikan bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. tingkat moneter yang buruk; seperti peternak, pekerja, dan perwakilan sederhana lainnya.

Sederhananya, madrasah mendapat gaji dari bagian SPP dalam jumlah yang kecil karena madrasah sendiri yang harus memutuskan berapa biaya pendidikan sesuai dengan keadaan keuangan daerah setempat di mana mereka berada. Namun hal tersebut berubah sesuai dengan pengaturan cadangan Bantuan Fungsional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada semua sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Namun, ini sebenarnya tidak dapat menutupi subsidi pendidikan yang penting.

Sumber kekayaan lainnya adalah bantuan yang diberikan oleh daerah setempat dalam bentuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Mata air aset ini tidak tetap. Juga, jumlah dan keberadaannya tidak dapat ditemukan. Hal ini wajar, mengingat masalah zakat para eksekutif dan porsinya sendiri. Bantuan tidak disengaja lainnya disediakan oleh otoritas publik dan negara bagian provinsi. Begitu juga dengan ZIS, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, misalnya Penyaluran Aset Unik, Aset Swadaya, BOMM, BOP, BKG, dan BKS, selain lebih bersifat kebetulan dan tidak jauh jangkauannya, tidak semua madrasah juga mendapatkannya. Biasanya, berbagai bantuan diperoleh setelah pihak sekolah mengajukan permohonan kepada pemerintah lingkungan. Selain itu, dalam berbagai kasus yang terjadi di berbagai daerah, hanya madrasah tertentu yang mendapatkannya. Untuk situasi ini, faktor kedekatan antara komponen koordinator madrasah dan pemerintah daerah sangat mempengaruhi kelancaran bantuan. Untuk madrasah yang tidak mengadakan pertemuan tertentu.

Masalah lain yang biasanya muncul ialah daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Padahal, hal ini sangat penting mengingat masyarakat sebagai partisipan dan pendorong ke arah suksesi program lembaga pendidikan. Keberadaannya sangat penting guna menunjang pembiayaan pendidikan. Kenapa hal ini terjadi? Karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penganggaran, sehingga tingkat perhatian mereka terhadap lembaga berhenti pada wilayah *memasrahkan* anak didiknya saja.

**Solusi Perbaikan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam**

Menganalisis masalah yang sangat dilematis di atas, kemajuan penting diharapkan untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan sudut pandang penulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, masalah dukungan adalah masalah yang sangat sensitif. Hal ini karena dapat membawa kemajuan bagi pembangunan dengan asumsi diawasi dengan baik, justru akan memangkas pondasi, jika bagian/pihak dalam organisasi tidak mengawasi secara ahli, tidak memiliki standar transparansi, tidak diatur menuju kemajuan, memiliki kepentingan individu dalam membangun pondasi sehingga berusaha membuka pintu hanya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, semua bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, menurut cara yang paling umum untuk mempersiapkan pembiayaan pelatihan, harus dilibatkan. Hal ini dilakukan sebagai indikasi standar transparansi, persekutuan, dan kewajiban terkait perintah kelembagaan yang harus dibagi. Pendirian besar dan mengerikan menjadi tanggung jawab bersama.

Kedua, mengenai pengaturan porsi aset, majelis di dalamnya diupayakan agar dapat mempersiapkan dan mengelolanya dengan baik, besaran anggaran yang ada, cara pengeluaran atau pengeluaran anggaran, dan apa saja yang harus dilakukan. adalah kerangka pengungkapan. Jika ada bagian di dalamnya yang kurang paham, persiapan harus dilakukan dengan cara yang paling mahir untuk menyusun anggaran yang layak. Sangat mungkin mempersiapkan dalam perencanaan atau sesuatu yang hampir identik.

Ketiga, kepala sebagai penggerak utama, diharapkan memiliki kemampuan usaha bisnis (business ability) dan kemampuan administrasi dan manajemen.

Keempat, madrasah hendaknya mengikutsertakan daerah setempat dalam merencanakan subsidi pelatihan, melalui musyawarah standar atau bisa juga dikenang untuk musrenbang/musyawarat pemikiran kelulusan. Ini dilakukan sebagai bentuk aturan transparansi.

Kelima, lembaga pendidikan Islam, untuk situasi ini madrasah, sebagai organisasi berbasis ketat di mana ada kualitas terhormat, seharusnya menjaga standar ekuitas, standar kepercayaan, ketulusan, pertimbangan, penerimaan, disiplin, dll Standar ini harus melekat pada semua komponen organisasi. Menimbang, diyakini akan ada jawaban untuk administrasi pembiayaan pesantren, sehingga akan terbentuk organisasi pendidikan Islam yang layak, terutama dalam hal dukungan pelatihan.

**KESIMPULAN**

Setelah menyimak percakapan-percakapan dalam tulisan ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa disampaikan. Subsidi pelatihan pada hakekatnya berpusat pada upaya penyampaian manfaat pengajaran dan beban yang harus ditanggung oleh daerah setempat. Biaya adalah berapa banyak uang yang dikeluarkan atau manfaat yang diberikan kepada siswa. Pembiayaan pelatihan terkait dengan sosialisasi tarif pajak dalam berbagai jenis pertemuan tugas serta strategi untuk menyediakan biaya ke sekolah. Hal utama dalam pembiayaan pendidikan adalah berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, dari mana sumber uang itu diperoleh, dan kepada siapa uang itu harus dibelanjakan.

Dilihat dari sumbernya, biaya pelatihan dapat dikelompokkan menjadi empat macam, pertama, biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah. Kedua, biaya pelatihan disebabkan oleh daerah setempat atau wali/penjaga peserta didik. Ketiga, biaya pendidikan ditanggung oleh masyarakat umum, bukan mahasiswa, misalnya bantuan dari lembaga keuangan dan organisasi. Selanjutnya, keempat, biaya instruktif ditimbulkan oleh organisasi instruktif itu sendiri. Dalam penyelidikan pendanaan pelatihan, ada beberapa istilah penting yang harus diperhatikan, antara lain objek biaya, data administrasi biaya, pendukung, keuangan, rencana keuangan, biaya, cost driver. Istilah-istilah ini adalah lampu hijau dalam penyelidikan masalah keuangan.

Sistem persekolahan yang benar yang dikoordinasikan oleh negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Pernah, pada masa Khalifah Umar canister Khatthab, sumber dana untuk kepentingan umum (menghitung pelatihan), berasal dari jizyah, kharaj (pembebanan tanah), dan usyur (tuntutan sumber daya modern). Muslim yang menjangkau garis publik). Sementara itu, beberapa pemeriksaan mengungkapkan bahwa kendala yang sering dihadapi madrasah dalam penyelenggaraan pembinaan penunjang diklat mulai dari persoalan yang berkaitan dengan aset yang sebenarnya. Penghalang utamanya adalah karena terbatasnya sumber-sumber aset yang dapat diduga, SDM yang dapat diduga masih rendah, dan batas bantuan daerah setempat juga rendah. Selanjutnya, pihak-pihak di dalam madrasah harus memiliki pilihan untuk merencanakan dan mencari cara mendanai pendidikan dengan tepat; apa rencana keuangan saat ini, berapa banyak rencana pengeluaran yang dikeluarkan atau disampaikan, dan apa kerangka pengumumannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, A. A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 87–99. Retrieved from http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/95

Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *23*(2), 26–36.

Efrina, L. (2019). Etos Kerja Islam Dan Budaya Organisasi: Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Multifinance Syari’Ah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(2), 259. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5808

Haekal, T. M., KS, M. M., Yusuf, M. I., Wahyudi, M. A., Fajri, Y., & ... (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V3RdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA123&dq=modernisasi+sitem+administrasi+perpajakan&ots=4ilL90WcO9&sig=bf8gjqzSmuKbsFh5v8S0ZSOnqvI

Haris, I. A & Maulana, O. (2021). Peranan Organisasi Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Lampung Selatan. *An Nida: Jurnal An Nur*, *1*(1), 18–25.

Huda, N., Achmad, U., Banjarmasin, Y., Jalan, F., & Km, A. Y. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, *3*(2), 332–341.

Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, *17*(3), 263–269. https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9620

Rahmadoni, J. (2018). Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sd Indonesian Creative School Pekanbaru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, *3*(2). https://doi.org/10.31851/jmksp.v3i2.1855

S Nasution. (2009). *metode-research-penelitian-ilmiah-* (p. 35). p. 35. Bumi Aksara.

Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, *9*(1), 25. https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702

Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria:   Journal of Islamic Education Management*, *1*(1), 77–98. https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.272